

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan sumber daya manusia. Hal itu harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan yang terarah dan pelaksanaan yang intensif guna meraih tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan untuk kemajuan bangsa. Peningkatan mutu pendidikan ini telah diarahkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sekalipun sudah dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan mutu pendidikan, fakta di lapangan menunjukkan hasil bahwa mutu pendidikan di Indonesia belum mampu mencapai tujuan yang maksimal. Hal ini diperparah dengan ketersediaan sarana dan prasana juga belum memadai, masih ada gedung-gedung sekolah yang kondisinya rusak sehingga menyebabkan kegiatan belajar mengajar harus dilakukan di halaman sekolah atau menempati rumah-rumah penduduk (Nurhasanah et al. 2024). Kekurangan tenaga guru di berbagai daerah juga masih menjadi permasalahan yang cukup pelik. Semua permasalahan yang

disebutkan tak kurang dan tidak lebih merupakan masalah yang diakibatkan kesalahan dalam penerapan kurikulum dalam lembaga pendidikan (Setiawati et al. 2023).

Berbagai fenomena di atas yang dapat menjadikan penurunan mutu pendidikan, maka oleh pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan perubahan pada kurikulum. Menurut (Shinta Ledia 2024) kurikulum ialah sekumpulan alat pembelajaran yang berisi tentang tujuan, isi, bahan ajar serta metode serta media yang dijadikan bahan serta alat pada proses belajar mengajar guna tercapainya tujuan pendidikan secara nasional.

Proses perubahan kurikulum yang terdapat di Indonesia sudah banyak mengalami perubahan serta pergantian karena demi penyempurnaan berjalannya proses pendidikan agar jauh lebih baik dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Perubahan kurikulum dimulai pada tahun 1947 sampai tahun 1997. Selanjutnya proses pergantian dan penyempurnaan kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) serta di tahun 2013 pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional melakukan pergantian kembali menjadi kurikulum 2013 (Kurtilas) serta di tahun 2018 berlangsung pergantian menjadi Kurtilas Revisi". Dalam proses berjalannya perubahan kurikulum dari tahun ketahun ini ialah agar proses berjalannya arus pendidikan menjadi lebih berkualitas. Perubahan kurikulum 2013 adalah keberlanjutan dari kurikulum 2006, maka bagian-bagian yang terdapat pada kurikulum 2013 ialah pengembangan terhadap kurikulum sebelumnya (Devi Erlistiana et al. 2022).

Di era perkembangan teknologi yang semakin meningkat ini hadirnya suatu kurikulum baru yakni kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dipahami menjadi seperangkat proses pembelajaran yang menyediakan kebebasan baik terhadap guru dan siswa dalam menjalankan pembelajaran dengan santai, menyenangkan, bebas stres dan bebas tekanan. Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka bermaksud sebagai saran tambahan dalam rangka memulihkan pembelajaran dari tahun 2022 hingga 2024 serta dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Kebijakan Kemendikbudristek berkaitan kurikulum nasional nantinya dilakukan pengkajian di 2024 dengan didasarkan penilaian sewaktu masa pemulihan pembelajaran. Kurikulum Merdeka ialah model pengembangan seperangkat pembelajaran yang cenderung fleksibel, sekaligus beridentikkan terhadap materi kemampuan serta pengembangan karakteristik serta kemampuan siswa. Ciri utama dalam kurikulum merdeka ialah diharapkan dapat mendorong adanya pemulihan pembelajaran sebelumnya, dalam kurikulum merdeka ini menitikberatkan proses pembelajaran yang meliputi: Pembelajaran berdasarkan proyek guna pengembangan *soft skills* serta karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila serta konsentrasi terhadap materi esensial yang nantinya dapat membantu proses pembelajaran yang lebih menekankan pada kompetensi dasar misalnya literasi dan numerasi (Kemendikbudristek 2021).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Menerapkan bahwa kurikulum

merdeka mulai ditetapkan pada tahun ajaran baru 2022-2023 (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 2022). Kurikulum Merdeka disusun demi memenuhi kebutuhan zaman yang semakin hari semakin menuntut pada lembaga pendidikan kita. Hal ini selaras dengan pernyataan bahwa kurikulum disusun dan dikembangkan untuk menggali lebih baik potensi, perkembangan jiwa dalam memenuhi tuntutan zaman (Solehudin, Priatna, and Zaqiyah 2022).

Pada tahun 2024 Kementerian Pendidikan Republik Indonesia kembali mengeluarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2024 sebagai revisi atas Permendikbud Nomor 7 Tahun 2022. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2024 mengacu pada Kurikulum Merdeka dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan Profil Pelajar Pancasila serta menyederhanakan muatan wajib belajar menjadi kelompok A terdiri dari mata pelajaran Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Kelompok B: Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Sekolah diberi keleluasaan untuk memilih kelompok A atau B. Muatan wajib belajar lainnya seperti Prakarya, Seni Budaya, dan muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks daerah.

Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah (1) Pembelajaran berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila (2) fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk

pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi (Ujang, et.al, 2022).

Tujuan Kemendikbud meluncurkan Kurikulum Merdeka ialah untuk mereformasi pendidikan yang berfokus pada transformasi budaya sekolah. Menurut (Sumarsih et al. 2022) budaya sekolah yang berfokus pada budaya administrasi tidak baik, budaya yang baik harus berorientasi pada inovasi dan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik, dengan harapan akan tercipta lulusan dengan profil pelajar Pancasila. Daga juga mengungkapkan hal yang serupa mengenai budaya administrasi yang berbelit membuat tugas guru dalam pembelajaran tidak optimal dalam proses pembelajaran di kelas (Daga 2021). Perubahan dalam bidang sosial dan teknologi yang telah masuk Era *Society 5.0* memerlukan sebuah kurikulum yang sesuai (Haryati, Anar, and Ghufron 2022). Kurikulum merdeka belajar ini diharap dapat mampu meningkatkan kompetensi seluruh elemen yang terlibat dalam peningkatan mutu pendidikan (Widiyono, Irfana, and Firdausia 2021).

Kajian ini dilakukan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di SMP Negeri 1 Labuhanhaji Barat dan SMP Negeri 2 Labuhanhaji Barat. Sedangkan SMP Negeri 3 Labuhanhaji Barat baru saja menerapkan kurikulum merdeka. Berdasarkan informasi awal yang peneliti peroleh dari keterangan pihak sekolah bahwa di SMP se-Kecamatan Labuhanhaji Barat sebelum berlakunya Kurikulum Merdeka juga diberlakukan Kurikulum 2013. Namun, sejalan dengan kebijakan

pemerintah terkait kurikulum, maka ketiga SMP se-Kecamatan Labuhanhaji Barat juga mengikuti pembelajaran berdasarkan Kurikulum Merdeka.

Contoh nyata pentingnya implementasi Kurikulum Merdeka dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan di SMP se-Kecamatan Labuhanhaji Barat Kubupaten Aceh Selatan ialah penerapan nilai-nilai perilaku atau akhlak yang baik melalui program P5 serta pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang banyak mendukung keberhasilan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti mendapatkan informasi bahwa SMP Negeri 1 Labuhanhaji Barat yang merupakan salah satu SMP yang sudah tergolong baik yang ditandai nilai Akreditasi SMP Negeri 1 Labuhanhaji Barat berakreditasi B. Prestasi SMP Negeri 1 Labuhanhaji Barat tersebut dapat pula dilihat dalam aspek pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan tenaga SDM baik guru maupun pegawai sekolah serta prestasi belajar sebagian besar siswa yang sudah memenuhi ketentuan dalam Kurikulum Merdeka, begitu juga dengan SMP Negeri 2 Labuhanhaji Barat.

Namun, peneliti masih mempertanyakan apakah gambaran mutu pendidikan yang sudah baik di SMP se-Kecamatan Labuhanhaji Barat itu karena setelah diterapkannya Kurikulum Merdeka atau memang sudah baik sejak belum diberlakukannya Kurikulum Merdeka. Jika pun iya di sebabkan oleh adanya implementasi KM, maka perlu juga dilihat sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP se-Kecamatan Labuhanhaji Barat tersebut.

Hal ini penting dilakukan kajian lebih lanjut, mengingat beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hambatan dalam penerapan KM di sebuah sekolah. Seperti kajian (Aini Qolbiyah, Sonzarni, and Muhammad Aulia Ismail 2022) yang menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka Belajar mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa implementasi kurikulum di sekolah penggerak telah dilaksanakan dengan optimal dan sedang berlangsung, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan hambatan. Dalam penelitian lain oleh (Susilowati 2022) mengatakan bahwa implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah telah berjalan namun ada beberapa kendala yang dihadapi guru dalam mengimplementasikannya. Kendala yang terkait dengan pemahaman berkisar pada belum dipahaminya esensi ‘merdeka belajar,’ sulit untuk menghilangkan kebiasaan lama yakni masih mendominasinya metode ceramah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Labuhanhaji Barat”**.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menfokuskan pada aspek implementasi kurikulum merdeka pada SMP di Kecamatan Labuhanhaji Barat Aceh Selatan serta dampaknya terhadap mutu pendidikan pada SMP di Kecamatan Labuhanhaji Barat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka yang menjadin rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi kurikulum merdeka pada SMP di Kecamatan Labuhanhaji Barat?
2. Bagaimana dampak implementasi kurikulum merdeka terhadap mutu pendidikan pada SMP di Kecamatan Labuhanhaji Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kurikulum merdeka di SMP se-Kecamatan Labuhanhaji Barat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak implementasi kurikulum merdeka terhadap mutu pendidikan pada SMP di Kecamatan Labuhanhaji Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pengembangan khazanah pengetahuan pendidikan umumnya, dan khususnya terkait implementasi kurikulum merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan pada SMP di Kecamatan Labuhanhaji Barat, serta dapat menjadi masukan dan landasan kajian untuk pengembangan penelitian di selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Kepala pihak sekolah, kajian ini sebagai bahan masukan dan evaluasi terkait implementasi kurikulum merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan pada SMP di Kecamatan Labuhanhaji Barat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi kurikulum merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan pada SMP di Kecamatan Labuhanhaji Barat.

1.6 Definisi Istilah

1.6.1 Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan konten yang lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian, dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.

1.6.2 Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan menurut Permendiknas nomor 63 tahun 2009 adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas siswa dikembangkan dengan cara membebaskan siswa dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan.